**IMPLEMENTASI PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA
PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG
BUKTI DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Josua Karsia
Pembimbing I : Dr. Mukhlis R., S.H., M.H.
Pembimbing II : Elmayanti, S.H., M.H.
Alamat: Jalan Garuda Sakti Km 06
Email: josuakarsia@gmail.com**

ABSTRACT

Currently, in the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2010 concerning Procedures for Managing Evidence in the National Police of the Republic of Indonesia there is no provision in the Article which states the cost of borrowing evidence. However, in reality there are not a few pieces of evidence in criminal cases where if used, the user must pay a number of guarantees to existing law enforcement. Meanwhile, based on the principle of legality which is based on the rule of law and the rule of law, the ranks of law enforcement officers are not justified. The purpose of this study is to find out the implementation and legal impact of borrowing and using evidence in criminal cases based on the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2010 concerning Procedures for Managing Evidence at the Pekanbaru City Police.

This research uses the type of empirical legal research or sociological legal research. The sample in this study were the head of the Pekanbaru City Resort Police and investigators at the Pekanbaru Police. The analytical tool in this study is a qualitative method. This study found that there were things that were less than optimal in reality on the ground, so it was necessary to anticipate them with maximum effort.

This study concluded that the implementation of borrowing evidence in criminal cases according to the National Police Regulation number 10 of 2010 was not in accordance with existing legal provisions. The borrowing of evidence was accepted by police investigators without any determination from the trial. In addition, the act of asking for security deposits to parties who want to borrow using criminal evidence is not allowed because these actions are outside the applicable legal provisions. However, this phenomenon is still often carried out by police investigators. Investigators should not do this by asking for security deposits from parties who want to borrow or use them. The legal impact on the borrowing of evidence in criminal cases based on the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2010 concerning Procedures for Evidence Management at the Pekanbaru City Resort Police With the action of asking for a security deposit by the investigator on the evidence that wants to be loaned to the applicant, the author considers the actions committed by the investigator to be illegal levies because these actions are not expressly regulated in Perkapolri number 10 of 2010.

Keywords: Borrowing - Evidence - Criminal Case

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana.²

Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.³

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁴ Sedangkan, alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵

Dewasa ini, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada ketentuan Pasal yang menyebutkan tentang biaya peminjaman barang bukti. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti perkara pidana yang apabila digunakan, pemakai harus membayar sejumlah jaminan kepada penegak hukum yang ada. Sedangkan berdasarkan asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:⁶

- a. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau undue to law maupun undue process,
- b. Bertindak sewenang- sewenang, atau abuse of power.

Jika dikaji dari asas tersebut, tindakan meminta uang jaminan kepada pihak yang hendak meminjam pakai barang bukti pidana tidak diperkenankan karena tindakan tersebut diluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi fenomena tersebut masih sering dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi Atasan penyidik di tingkat penyidikan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja, tindakan tersebut bisa dilakukan selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penyidikan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Namun demikian, pemilik barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian berhak untuk meminjam pakaikan barang tersebut dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari atasan penyidik kepolisian Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak”.

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Galia, Jakarta, 2007, hlm 36.

¹H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.116

²Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 23.

³Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8.

⁴M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 46.

⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Barang bukti tersebut sangat diperlukan dalam proses penyidikan dalam suatu tindak pidana. Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai unntuk melakukan delik. Berdasarkan fenomena kejadian terebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah dampak hukum terhadap pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Dampak Hukum Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan

bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi sebagai bahan akademis dan pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.
- c. Bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan tugas dan perannya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrument hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrument hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan dayapaksa keberlakuan hukum itu sendiri.

Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi;
2. Tahap aplikasi
3. Tahap eksekusi

Pada kasus pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana ini merupakan penegakan kebijakan ditahap aplikasi. Pada prosesnya, penegakan hukum tentunya tidak serta merta dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya perencanaan dan konsep yang jelas dalam pelaksanaannya.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang mana keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada sehingga perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama.

Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan yang dimaksud dengan kesebandingan hukum ialah kesetaraan atas kesetimpalan dalam penjatuhannya terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya dan latar belakang yang menyebabkan berbuat kesalahan tersebut.⁸

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.⁹

2. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.¹⁰
3. Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹
4. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹²
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁴
7. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵
8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.¹⁶

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81.

¹²Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 2.

¹³*Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

⁸Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187.

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlakuserta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁷ Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang langsung di lakukan di lapangan didasari dengan fakta yang terjadi di lapangan dan juga mengamati perilaku-perilaku dari individu-individu dalam masyarakat apakah sudah berlaku kah hukum di lingkungan masyarakat tersebut. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁸ Populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Pekanbaru.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁹ dengan menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu Kajian Hukum Tentang Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum di perpustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana. Data sekunder terdiri dari:

a).Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian sekunder atau yang diperoleh dengan studi

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

dokumentasi atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c). **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu: Wawancara dan Kajian Kepustakaan.

6. **Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:²¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Kejahatan
- 2) Pelanggaran

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam pasal 103 yaitu: ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian sebagai Penyidik

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian: "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

2. Pengertian penyidikan

Penyidikan Adalah Serangkaian Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mencari Dan Mengumpulkan Bukti, Bahwa Bukti Membuatnya Jelas Bahwa Pelanggaran Terjadi, dan Menemukan Tersangka. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negri Sipil Di Pejabat Pemerintah. Pada tindakan penyelidikan, penekannya diletakan kepada tindakan "mencari dan

²⁰ Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan konsentrasi penekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Tujuan dari penyidikan ialah membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

3. Kepolisian dalam konteks penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Di dalam pasal 1 butir ke-1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”²²

2. Macam-macam Barang Bukti

Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar

udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal bus, terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

B. Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bemarkas di Jl.A.Yani No.11 Pekanbaru. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dengan berpangkat Kombes Pol serta Waka Polresta yang berpangkat AKBP.

C. Visi Polresta Pekanbaru

Pernyataan Visi Polresta adalah:

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Azazi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.

D. Misi Polresta Pekanbaru

Adapun misi kepolisian resor kota Pekanbaru antara lain:

- 1) Menciptakan suasana lingkungan.
- 2) Kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran
- 3) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
- 4) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
- 5) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
- 6) Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
- 7) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga

²²Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 254.

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.

- 8) Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kantibmas.
- 9) Memelihara kantibmas dengan koordinasi aparat kantibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
- 10) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak azazi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 11) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 12) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

E. Kedudukan dan Tugas Polresta Pekanbaru

- a) Kedudukan Polresta Pekanbaru
Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan Polda.
- b) Tugas Polresta Pekanbaru
Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010

Pada proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan

antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan pemeriksaan surat. Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan definisi Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang bukti atau benda sitaan yang bertanggung jawab dan kewenangan yuridisnya ada pada penyidik maka, barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan. Karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.²³ Akan tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu tindak pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHAP).

Dalam tindak pidana tidak ada kualifikasi barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan karena, semua barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana wajib disita oleh penyidik yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk proses pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang dapat disita sesuai yang diatur Pasal 39 ayat (1) yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau hasil delik.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

²³Soni Praja Manurung, Ismail, dan Salim Fauzi Lubis, Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5 No. 4, November-Desember, Fakultas Hukum Universitas Asahan, 2019, hlm. 153.

Penelitian ini dikhususkan pada implementasi pinjam pakai barang bukti yang disita oleh penyidik. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Pekanbaru. Tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan tanggung jawab secara fisik terhadap barang bukti sitaan. Barang bukti yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut sebagai barang bukti penyidikan. Selama barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekanbaru, pertama dimulai dari penyidikan apabila ada laporan, pengaduan, pengetahuan penyidik sendiri atau diketahui tertangkap tangan oleh penyidik, kemudian penyidik melakukan upaya paksa penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan badan dan rumah, dan penyitaan. Kedua, penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa (TKP). Memeriksa tersangka dan pemeriksaan saksi dan ahli. Ketiga, tersangka ditahan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti sedangkan barang bukti untuk keamanan dan pengelolaannya oleh Tahti, penyidik atau instansi yang terkait dengan penyimpanan barang bukti. Apabila berkas perkara belum lengkap maka pengadilan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan penyidik wajib melengkapi berkas-berkas tersebut. Setelah berkas perkara lengkap (P21) maka tersangka dititipkan di Rutan sementara barang bukti yang disita akan dieksekusi oleh hakim. Aparat penegak hukum berkewajiban dalam mengembalikan barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana.

Berbicara tentang barang bukti dalam perkara pidana sangat erat hubungannya dengan penyitaan, sebab barang bukti yang didalam penguasaan/ pengawasan penyidik untuk dilakukan pengamanan atau yang menjadi tanggung jawab penyidik adalah dengan tindakan penyitaan. Penyitaan

yang dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Lebih lanjut lagi, di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur dalam Pasal 44 yang menyinggung tentang barang sitaan tersebut, adapun bunyi Pasal tersebut yakni:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dewasa ini, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada ketentuan Pasal yang menyebutkan tentang biaya peminjaman barang bukti. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti perkara pidana yang apabila digunakan, pemakai harus membayar sejumlah jaminan kepada penegak hukum yang ada. Sedangkan berdasarkan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:²⁴

- a. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*,
- b. Bertindak sewenang- sewenang, atau *abuse of power*.

Jika dikaji dari asas tersebut, tindakan meminta uang jaminan kepada pihak yang hendak meminjam pakai barang bukti pidana tidak diperkenankan karena tindakan tersebut diluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi fenomena tersebut masih sering dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dewasa

²⁴M. Yahya Harahap, Galia, *Op.Cit.*, hlm 36.

ini, dengan adanya dasar hukum diatas bahwasanya dengan meminta uang jaminan kepada pihak yang ingin menggunakan alat bukti atas perintah penyidik merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Walaupun barang itu bisa saja dilakukan peminjaman tapi tidak serta merta dengan pemberian uang jaminan. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi Atasan penyidik di tingkat penyidikan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja, tindakan tersebut bisa dilakukan selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penyidikan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana hanya bersifat sementara. Dalam artian, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila suatu perkara telah memiliki putusan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan:²⁵

- a) Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai keputusan;
- b) Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;
- c) Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti pada perkara lain.

Namun demikian, pemilik barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian berhak untuk meminjam pakaikan barang tersebut dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari atasan penyidik kepolisian Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, "barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak". Adapun prosedur pinjam pakai tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
- b) Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk mrnolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
- c) Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada pejabat pengemban fungsi pengelolaan barang bukti.

Jika mengacu pada keberadaan Pasal 23 ayat (1) Perkapolri tersebut tentunya diperkenankan untuk melakukan pinjam pakai barang bukti, akan tetapi harus memenuhi beberapa prosedur yang sudah di tetapkan. Lebih lanjut lagi, Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

Kemudian, penulis melaksanakan wawancara kepada penyidik polresta pekanbaru dan mendapatkan data sejumlah orang yaitu:²⁶

1. Andy Wiryanto, yang beralamat di JL.Gatot Subroto GG. Seribu Dua No. 22 RT/RW 2/5, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, beliau melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 unit mobil pajero sport yang merupakan barang bukti kasus pencurian roda empat dari parkiran depan rumah, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut telah disita oleh pihak penyidik kepolisian. Dalam hal ini, pemohon tersebut melakukan pinjam pakai barang bukti dan kemudian menyerahkan sejumlah uang jaminan, dengan catatan ketika barang bukti tersebut dibutuhkan, beliau harus bisa menghadirkan barang bukti tersebut.
2. Gilang Dwi Pangga, yang beralamat di JL. Datuk Laksamana No.24 Kel Sukamaju Kec Sail Kota Pekanbaru, beliau melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox yang merupakan barang bukti kasus pertolongan jahat dan beliau telah melakukan pinjam pakai barang bukti tersebut, namun harus menyerahkan sejumlah uang jaminan barang bukti tersebut.

²⁵Penjelasan Pasal 46 ayat 2 KUHAP.

²⁶ Wawancara penulis dengan Penyidik Polresta Pekanbaru, pada 12 Mei 2023 pukul 09.00 Wib.

3. Khairunisa, beralamat di JL. Dwikora Gg Pribadi No. 05, Rt 005 Rw 004, Kel. Suka Maju, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti mengenai pinjam pakai barang bukti 1 unit handphone merk Vivo V21 warna *diamond flare* yang merupakan barang bukti kasus pencurian. Dalam hal ini, beliau telah melakukan pinjam pakai barang bukti yang mana harus membayar sejumlah uang sebagai jaminan barang tersebut. Dengan catatan ketika barang bukti tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan, beliau harus bisa menghadirkan barang bukti tersebut.

Selanjutnya, penulis melanjutkan wawancara dengan penyidik Polresta Pekanbaru, mengenai perbuatan meminta uang jaminan peminjaman barang bukti. Bahwasannya, uang jaminan itu kami rasa dapat dijadikan sebagai cara yang efektif agar barang tersebut dapat benar-benar terjaga bagi pihak yang ingin meminjanya. Pihak penyidik melakukan hal demikian agar barang bukti dalam perkara pidana yang dipinjam pakaikan tidak hilang ataupun rusak, dan barang bukti dapat dihadirkan secepatnya pada saat diperlukan dalam proses persidangan.²⁷ Lebih lanjut lagi, mengenai pengembalian uang jaminan tersebut, Penyidik menjelaskan bahwa uang jaminan tersebut akan dikembalikan ketika Kejaksaan memberitahukan hasil penyidikan sudah lengkap.²⁸

Selanjutnya untuk mendukung data hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan para pemohon pinjam pakai barang bukti. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemohon pertama, bahwasannya benar adanya beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti dengan dalil barang bukti kendaraan roda empat tersebut digunakan untuk transportasi pemohon dan pemohon telah memberikan sejumlah uang jaminan kepada penyidik. Kemudian, pemohon telah menerangkan kepada penulis bahwa sampai perkara ini selesai, uang jaminan pinjam pakai barang bukti tersebut akan

dikembalikan. Pada kenyataannya, sampai perkara tersebut selesai, uang jaminan barang bukti ternyata tidak kunjung dikembalikan.²⁹

Kemudian, berdasarkan wawancara penulis dengan pemohon kedua, bahwasannya benar adanya beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti dengan dalil barang bukti kendaraan roda dua digunakan sebagai transportasi untuk perkuliahan dan pemohon telah memberikan sejumlah uang jaminan kepada penyidik. Kemudian, pemohon telah menerangkan kepada penulis bahwa sampai perkara ini selesai, uang jaminan pinjam pakai barang bukti tersebut akan dikembalikan. Pada kenyataannya, sampai perkara tersebut selesai, uang jaminan barang bukti juga tidak kunjung dikembalikan.³⁰

Kemudian, berdasarkan wawancara penulis dengan pemohon ketiga, bahwasannya benar adanya beliau mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti dengan dalil barang bukti *handphone* digunakan sebagai kebutuhan komunikasi sehari-hari dan pemohon telah memberikan sejumlah uang jaminan kepada penyidik. Kemudian, pemohon telah menerangkan kepada penulis bahwa sampai perkara ini selesai, uang jaminan pinjam pakai barang bukti tersebut akan dikembalikan. Pada kenyataannya, sampai perkara tersebut selesai, uang jaminan barang bukti juga tidak kunjung dikembalikan.³¹

Setelah penulis melakukan wawancara dengan tiga pemohon diatas, kebanyakan pemohon tidak mengetahui bahwa pinjam pakai barang bukti tersebut tidak memerlukan uang jaminan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa, “barang bukti yang disita dan disimpan ditempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak

²⁹Wawancara penulis dengan pemohon yang bernama Andy Wiryanto pada 14 Mei 2023 pukul 16.43 Wib.

³⁰Wawancara penulis dengan korban yang bernama Gilang Dwi Pangga pada 16 Mei 2023 pukul 19.10. Wib.

³¹Wawancara penulis dengan korban yang bernama Khairunnisa pada 16 Mei 2023 pukul 20.10. Wib.

²⁷Wawancara penulis dengan Ipda Hendrimen pada 12 Mei 2023 pukul 09.30 Wib.

²⁸*Ibid.*

yang berhak". Adapun prosedur pinjam pakai tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
- b) Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
- c) Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada pejabat pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, bahwasannya teori penegakan hukum dapat menjadi pisau analisa yang dapat digunakan dalam penyelesaian dalam problematika tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa, tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum.

Oleh sebab itu, dengan adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi acuan yang konkret dalam implementasi pinjam pakai barang bukti yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang ada. Selain itu, penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memperkecil atau bahkan menekan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dan salah satunya yang berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti yang terjadi di Kepolisian Resor Pekanbaru.

B. Dampak Hukum Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Barang Bukti mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya:

- 1) menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- 2) mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;

- 3) menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- 4) mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- 5) mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- 6) mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- 7) memusnahkan barang bukti.

Pada dasarnya, barang bukti dapat dikeluarkan hanya untuk:

- 1) Keperluan penyidikan tertuang didalam Pasal 17 Perkapolri 10 Tahun 2010.
- 2) Dikirimkan ke jaksa penuntut umum di dalam Pasal 18 Perkapolri 10 Tahun 2010.
- 3) Dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak didalam Pasal 19 Perkapolri 10 Tahun 2010.
- 4) Dijual lelang, dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi didalam Pasal 20 Perkapolri 10 Tahun 2010.
- 5) Dimusnahkan, dalam hal barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang didalam Pasal 21 Perkapolri 10 Tahun 2010.

Dewasa ini, juga dapat dilakukan pinjam pakai barang bukti, akan tetapi barang bukti hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Perkapolri 10 Tahun 2010. Pengaturan tersebut pada dasarnya terangkum dalam Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan undang-undang, tanggung jawab terhadap barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 30 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP berada pada setiap tingkatan pemeriksaan. Oleh karena itu tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti harus dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut:

- 1) Pengembalian benda sitaan

Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c

KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

2) Mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti

Permohonan peminjaman benda sitaan dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti mobil sudah diajukan oleh saudara (sebagai pemohon), sebagai pemilik sah barang bukti. Namun, sampai saat ini permohonan tersebut belum dikabulkan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi pejabat penyidik yang berwenang di tingkat penyidikan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja, tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penyidikan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Barang bukti dalam suatu perkara pidana mempunyai peranan yang penting karena dengan adanya barang bukti aparat penegak hukum dalam menentukan nasib orang. Barang Bukti yang dimaksud juga mencakup barang bukti, dimana barang bukti itu adalah setiap barang milik tersangka/ terdakwa baik itu barang yang bergerak atau tidak bergerak maupun barang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan atau dipergunakan tersangka atau terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang-barang tersebut. Barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di dalam proses persidangan.

Hal yang sama juga ditemukan oleh penulis sendiri pada saat melakukan Studi di Kepolisian Resor Pekanbaru, penulis menemukan adanya beberapa praktek pinjam pakai barang bukti perkara pidana yang

dilakukan oleh Penyidik di Kepolisian Resor Pekanbaru yang dilakukan dengan berdasarkan adanya Surat Permohonan dari si pemohon tentang adanya kepemilikan barang yang dijadikan barang sitaan dan dijadikan barang bukti didalam pembuktian. Mayoritas permohonan dari si pemohon atau si pemilik barang atau yang mewakili adalah karena barang bukti yang sita tersebut adalah barang yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Selain itu sipemohon juga berkewajiban untuk merawat barang bukti yang sedang disita tersebut selama proses pinjam pakai dengan syarat tidak akan menjual atau mengubah kondisi barang bukti tersebut dan sipemohon bersedia menghadirkan barang bukti kapan saja jika diminta guna kepentingan persidangan.

Jika berkaca dari tindakan penyidik yang meminta uang jaminan pinjam pakai barang bukti dan berjanji akan mengembalikan uang jaminan setelah persidangan selesai, penulis menilai tindakan penyidik ini merupakan tindakan pungutan liar yang kemudian disebut dengan pungli. Selanjutnya, penulis menilai pungli yang dilakukan penyidik merupakan dampak hukum terhadap pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut, jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.³²

Kemudian, merujuk kepada Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun". Selanjutnya, penulis menitikberatkan hal ini dengan merujuk ke Perkapolri nomor 10 tahun 2010, bahwasannya tidak ada aturan pinjam pakai

³²Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Ardiyaryani, Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2019, hlm. 6.

barang bukti harus memberikan uang jaminan.

Dewasa ini, dari fenomena diatas maka penulis menyatakan sangat tepat jika menggunakan teori keadilan. Tolok ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, di samping untuk kepentingan tujuan hukum lainnya, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode-metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri. Hukum sebagai institusi keadilan karena mengatur hubungan antar manusia yang pada hakikatnya selalu bersentuhan dengan rasa keadilan.³³ Lebih lanjut lagi, dengan adanya teori keadilan ini dapat menyadarkan pihak yang selama ini seolah tidak dapat tersentuh hukum karena tidak adanya tindakan yang tegas dan lugas mengenai pertanggung jawaban bagi penyidik atau ketika melakukan pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pinjam pakai barang bukti diamini oleh penyidik kepolisian tanpa adanya ketetapan dari persidangan. Selain itu, tindakan meminta uang jaminan kepada pihak yang hendak meminjam pakai barang bukti pidana tidak diperkenankan karena tindakan tersebut diluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi fenomena tersebut masih sering dilakukan oleh penyidik kepolisian. Seharusnya penyidik tidak melakukan hal demikian dengan meminta uang jaminan kepada pihak yang ingin meminjam atau menggunakannya.
2. Dampak hukum terhadap pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan adanya tindakan meminta uang jaminan oleh penyidik terhadap barang bukti yang ingin dipinjam pakaikan kepada pemohon, penulis menilai perbuatan yang dilakukan penyidik merupakan perbuatan pungutan liar karena perbuatan tersebut tidak diatur secara tegas didalam Perkapolri nomor 10 tahun 2010.

B. Saran

1. Dalam hal ini perbuatan meminta uang jaminan agar barang bukti dapat diberikan tentunya sangat merugikan pihak pemohon maupun pihak keluarga yang ada. Seharusnya pihak berwenang tidak meminta uang jaminan kepada pemohon.
2. Penyidik seharusnya memberikan edukasi kepada pemohon agar barang tersebut dapat mereka gunakan kembali dengan prosedur yang harus mereka patuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni, dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia.
- _____, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

³³*Ibid.*, hlm. 264.

Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia, Jakarta.

Karjadi, M., dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Skripsi/Tesis/ Jurnal

Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Ardiyayani, 2019, Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Soni Praja Manurung, Ismail, dan Salim Fauzi Lubis, 2019, Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5 No. 4, November-Desember, Fakultas Hukum Universitas Asahan.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.